

# Kebijakan Pemerintah Uruguay Melanggar Hasil Konvensi Tunggal 1961 Berkaitan dengan Narkotika dan Psikotropika

Oleh :

Edward Rivaldo. S\*

[edwardrivaldo@ymail.com](mailto:edwardrivaldo@ymail.com)

Pembimbing : Drs. Idjang Tjarsono, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Binawidya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

## *Abstract*

*This study aims to explore the Uruguayan Government policy violates the 1961 Single Convention results relating to narcotic drugs and psychotropic substance, to knowing the implications that will be brought about by the Uruguay Government policy legalizing cultivation, distribution and consumption of cannabis/Marijuana trade international and to find out the extent to which the role of The International Narcotics Control Board (INCB).*

*This study used qualitative research methods which the source data was taken from books, journals, newspapers, internet, and previous research has relevant data with the title. The concept used in this study is the concept of national interest and the theory of Rational Actor. By using Nation - State level behavior analysis, the main focus is to study the behavior of states in getting its interests in international relations.*

*This study will describe Uruguay Government's violated The Single Convention of 1961 relating to narcotics and psychotropic. Uruguay Government made a policy which every citizen's can produce and use narcotics and psychotropic freely. Uruguay Government made a Legalization Cannabis/Marijuana. The policy Uruguay Government's was contradiction with the Single Convention of 1961 about narcotics and psychotropic. Regulation No. 19.172 really contradiction with Article 2 section 9, Article 4, and Article 36. The result of The Single Convention 1961 decided that utilising narcotics and psychotropic just for medical necessity and scientific research.*

*Keywords: Legalization, Policy Uruguay Government's, The Single Convention of 1961, narcotics and psychotropic*

\*Alumni Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

## Pendahuluan

Pesatnya perkembangan bisnis narkotika di dalam dunia internasional. Perkembangan narkotika yang sangat cepat tersebut membuat dunia internasional khususnya PBB perlu melakukan kebijakan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan narkotika khususnya ganja. Pada tahun 1961, dibentuklah suatu konvensi yang membahas mengenai Narkotika dan psikotropika, sering disebut dengan “*Single Convention on Narcotic Drugs 1961*”. Konvensi tunggal 1961 merupakan hasil konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di New York, tanggal 24 – 25 Maret 1961 yang diikuti oleh 73 Negara di dunia. Secara prinsipal konvensi ini bertujuan untuk menciptakan suatu konvensi internasional terhadap pengawasan internasional atas narkotika, menyempurnakan cara – cara pengawasan dan membatasi penggunaan hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, serta menjamin kerjasama internasional dalam pengawasan narkotika tersebut.<sup>1</sup> Hasil konvensi ini sudah dilakukan perubahan sesuai dengan relevansi perkembangan peredaran dan penggunaan narkotika yang semakin beragam cara peredarannya dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi maka pada tahun 1972 dibentuklah *Convention Psychotropic Substances*, Lalu mengalami perbaikan kembali pada tahun 1988 yang sering disebut dengan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic*

---

<sup>1</sup> Atmasamita, Romli. “Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam sistem hukum pidana Indonesia.” Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, Hal 28.

*Drugs and Psychotropic Substances 1988*.

Didalam proses untuk menjaga seluruh hasil konvensi yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika tersebut dilakukan oleh setiap – negara, dibentuklah suatu badan internasional yang bernaung dibawah kendali PBB yang bernama *The International Narcotics Control Board (INCB)*. INCB merupakan suatu badan monitoring independen PBB yang memastikan pelaksanaan hasil konvensi pengendalian narkotika internasional. Badan Ini didirikan pada tahun 1968 sesuai dengan Konvensi Tunggal Narkotika 1961.

Salah satu negara yang ikut dalam konvensi tunggal 1961 dan telah meratifikasi keputusan untuk mengikuti hasil konvensi tunggal 1961 adalah Uruguay. Uruguay merupakan sebuah negara yang berada di kawasan amerika selatan. Uruguay memiliki perbatasan darat yang langsung berhubungan dengan negara Brazil dan Argentina. Uruguay merupakan negara kedua terkecil di Amerika Selatan dan salah satu negara yang memiliki situasi ekonomi dan politiknya paling stabil di kawasan Amerika Selatan.

Pada tanggal 20 Desember 2013, Pemerintah Uruguay membuat sebuah kebijakan baru dengan melegalkan ganja bagi seluruh warga negara Uruguay yang telah berumur 18 tahun keatas, kebijakan ini juga disertai dengan ketentuan lain bahwa Pemerintah Uruguay juga memberikan kebebasan warga negara Uruguay untuk menanam ganja dirumahnya dengan batas maksimal menanam enam pot tanaman ganja di rumah mereka, dengan hasil tahunan maksimum 480 gram, Masyarakat Uruguay juga dapat membentuk

organisasi dengan jumlah anggota sebanyak antara 15 dan 45 anggota, dan secara kolektif hanya dapat menanam ganja dengan batas maksimal sebanyak 99 tanaman ganja. Kebijakan ini menjadi kotradiktif sekali karena pada peraturan ini Pemerintah Uruguay berperan sebagai pihak yang mengatur distribusi dan penjualan ganja kepada masyarakat Uruguay. kebijakan ini berjalan pada tanggal 10 april 2014 atau setelah 120 hari setelah penetapan resmi legalisasi ganja tersebut ditandatangani.

Kebijakan dari Pemerintah Uruguay untuk melegalkan ganja banyak mengalami kotradiksi dari negara lain yang menganggap keputusan Pemerintah Uruguay untuk melegalkan ganja merupakan langkah yang sangat terlalu beresiko dan terlalu terburu – buru mengingat bahwa masih banyak negara lain yang mengalami kegagalan dalam menangani masalah narkoba, dunia internasional juga menilai masih banyak cara lain yang masih dapat ditempuh tanpa harus langsung melegalisasinya.

Sebenarnya ada beberapa negara lainnya yang terlebih dahulu melakukan legalisasi ganja sebelum Pemerintah Uruguay memutuskan untuk melegalkan ganja seperti Amerika Serikat yang khusus diberlakukan untuk negara bagian Colorado dan Wasington dan beberapa negara lainnya seperti belanda, Kanada dan Israel. Dari seluruh kebijakan negara - negara yang telah melegalkan ganja tersebut hanya Uruguay yang memberikan akses termudah didalam mendapatkan dan mengkonsumsi ganja. Amerika Serikat, Pemerintah Amerika serikat hanya melegalkan ganja di dua negara

bagian saja yaitu Colorado dan Washington. Di kawasan *Colorado*, kebijakan untuk melegalkan ganja telah diresmikan Sejak tanggal 6 Desember 2012, ganja telah secara resmi dilegalkan untuk penggunaan pribadi dengan regulasi ganja untuk orang dewasa berusia 21 keatas dan Penanam ganja juga di memungkinkan hingga 6 batang pohon dan harus ditanam di dalam ruangan tertutup (*indoor*). Bagian negara *Washington*, peraturan yang diberlakukan berbeda dengan Colorado. Pengguna ganja di Washinton secara hukum diperbolehkan memiliki ganja paling banyak 28 gram dan penanaman ganja masih belum di izinkan kecuali orang tersebut mendapatkan otorisasi medis.

Dengan kebijakan Pemerintah Uruguay melegalkan ganja banyak pihak yang menyatakan menolak atas kebijakan ini, Kebijakan ini dikritik oleh badan PBB yang menangani permasalahan pelaksanaan hasil konvensi pengendalian narkoba internasional *The International Narcotics Control Board* (INCB). INCB menilai kebijakan Pemerintah Uruguay melegalisasi ganja sangat bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur didalam hasil konvensi tunggal 1961 dan menilai Pemerintah Uruguay telah melanggar ketentuan dari hasil konvensi tunggal 1961.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional. Menurut Jack C, Plano & Roy Olton, kepentingan nasional adalah *a strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other states or international entities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest.*

Maksudnya, suatu strategi atau jalannya tindakan terencana yang dibangun oleh pembuat keputusan negara terhadap negara lain atau kesatuan internasional yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan khususnya yang didefinisikan dalam istilah kepentingan nasional.<sup>2</sup> Berdasarkan definisi konsep kepentingan nasional yang dijelaskan oleh Jack C, Plano & Roy Olton, dengan keputusan untuk melegalisasikan ganja, maka Pemerintah Uruguay memiliki unsur kepentingan negara didalamnya, karena dengan keputusan tersebut pemerintah Uruguay melihat adanya aspek – aspek yang masih dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi negara, selain dengan menggunakan cara yang telah lazim digunakan didalam sistem internasional. Pemerintah Uruguay telah melakukan pertimbangan-pertimbangan didalam mengambil keputusan dan menganalisa semua pilihan yang telah dipilih Pemerintah Uruguay. Dengan keputusan ini, Pemerintah Uruguay telah lebih menerapkan konsep kepentingan nasional lebih diatas tatanan internasional.

Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan teori Aktor rasional Teori yang dipaparkan oleh Graham T. Allison memberikan gambaran mengenai proses pembuatan keputusan. Model yang digunakan adalah model aktor rasional, model proses organisasi dan model politik birokratik. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan aktor rasional untuk mencapai suatu tujuan. Aktor

rasional dipandang sebagai orang yang mengetahui tentang pilihan-pilihan yang tersedia dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap pilihan sebelum membuat keputusan. Berdasarkan kebijakan Pemerintah Uruguay, memandang dari sudut pandang bahwa didalam memerangi peredaran dan penggunaan narkotika tidak hanya menggunakan prinsip penangkapan bagi penggunaannya melalui alat – alat negara seperti pengadilan dan kepolisian yang harus bekerja dengan keras dan dengan menggunakan pengadilan dan kepolisian pasti akan menggunakan anggaran negara yang besar sehingga Pemerintah Uruguay membuat kebijakan dengan melegalisasikan ganja dapat mengatur dan mengetahui seberapa besar penggunaan dan peredaran ganja yang masuk secara ilegal.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kepentingan Ekonomi Dari Pemerintah Uruguay**

Globalisasi adalah suatu proses dimana antar individu, antar kelompok, antar negara saling berinteraksi, bergantung, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Hal ini juga tidak bisa dikesampingkan. Peredaran ganja secara ilegal merupakan salah akibat globalisasi yang tidak dapat dikendalikan oleh Pemerintahan negara - negara. Setelah terjadi perdebatan yang cukup lama, maka Parlemen Uruguay dan Presiden José Mujica akhirnya memberlakukan Undang - Undang 19.172, yang akhirnya membuat Uruguay menjadi negara pertama di dunia yang mengatur hukum pasar ganja dari benih sampai

---

<sup>2</sup> Jack C. Plano & Roy Olton, *The International Relations Dictionary* ( New York ; Holt Rinwart and Winston Inc, 1960), Hal 127

penjualan ganja. Sekarang Negara akan mengambil kontrol atas impor, ekspor, budidaya, produksi dan distribusi ganja melalui organisasi yang baru didirikan Institute for Regulation and Control of Cannabis (*Instituto de Regulación y Control de Cannabis*, IRCCA). Keputusan ini dibuat sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketidakmampuan Pemerintah Uruguay dalam menghadapi globalisasi ganja yang masuk ke Uruguay baik dalam bentuk illegal dan legal.

Paraguay merupakan produsen yang terbesar memasok ganja terbesar ke wilayah Uruguay. Paraguay juga merupakan negara yang memiliki jumlah tanaman ganja di Amerika Selatan, dan merupakan negara terbesar kedua setelah Meksiko di benua Amerika. Hasil ganja di Paraguay diperkirakan sebesar 5.000 sampai 8.000 hektar tanaman ganja yang dibudidayakan setiap tahunnya, dengan hasil tahunan sekitar 6.000 kilo per hektar, total produksi nasional Paraguay antara 30.000 dan 48.000 ton setiap tahun.<sup>3</sup> berdasarkan data yang didapat oleh JND, pada tahun 2011 sampai 2013, didapat data bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Uruguay menyita ganja sebanyak 1,96 ton, pada tahun 2012 sebanyak 1,98 ton dan pada tahun 2013 sebanyak 1,99 ton. Sebagian besar ini ditangkap di daerah sepanjang perbatasan dengan Argentina, di kantor pabean yang menangani daerah Sungai Uruguay atau di pelabuhan Montevideo dan menurut data Pemerintah Uruguay, meyakini

<sup>3</sup> <http://www.insightcrime.org/news-briefs/uruguay-marijuana-legalization-will-drive-paraguay-production-anti-drug-official> 09/04/2014 Pukul 16.51 WIB.

bahwa ini merupakan rute yang paling umum ganja impor memasuki Negara Uruguay.

Pada pasal 14 undang – undang yang baru berkaitan dengan narkotika Uruguay, Pemerintahan Uruguay menetapkan akan mengambil kontrol atas impor, ekspor, budidaya, produksi dan distribusi ganja, Pemerintah Uruguay, dijelaskan bahwa setiap individu yang masih berusia dibawah usia 18 tahun, tidak diperbolehkan untuk mengakses ganja psikoaktif untuk dikonsumsi dan tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota klub untuk mengakses ganja.. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan melanggar tindak pidana yang diatur oleh Keputusan - Undang Nomor 14.294 , tanggal 31 Oktober 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17.016 , 22 Oktober 1988, dan telah diubah menjadi undang-undang ini.

Kebijakan ini ditetapkan dengan pertimbangan permasalahan semakin banyak narapidana yang berasal dari kasus penyalahgunaan ganja di Uruguay akan semakin kompleks apabila tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Didalam menanggulangi masalah berkurangnya jumlah penjara dan terus meningkatnya narapidana yang masuk ke dalam tahanan, maka pihak penjara terpaksa memasukkan sepuluh narapidana dalam satu sel yang seharusnya berisikan tiga narapidana saja seharusnya. Dalam menaggulangi semakin meningkatnya jumlah narapidana dan semakin berkurangnya jumlah penjara maka Pemerintah Uruguay harus meningkatkan Anggaran Dalam Negeri Uruguay sebagai sumber dana untuk meningkatkan

jumlah penjara dan memperkuat sistem penjara.<sup>4</sup>

Pada awalnya peraturan yang dibuat Pemerintah Uruguay didalam menanggulangi permasalahan penggunaan ganja untuk dikonsumsi sendiri tidaklah terlalu ketat, karena Pemerintah Uruguay lebih memfokuskan pada penangkapan terhadap pengedar dan penggunaan ganja dengan skala besar dan menengah. Kebijakan Pemerintah Uruguay yang lebih mengutamakan penangkapan terhadap pengguna dan pengedar ganja yang berskala menengah dan besar menimbulkan implikasi bahwa pada kenyataannya, pengedar dan pengguna ganja dalam skala kecil yang semakin banyak jumlahnya.

Pengguna ganja tertinggi berkisar pada umur 20 - 24 tahun dengan jumlah pengguna sebanyak 1761 jiwa, dengan persentase 22,3. Selain itu usia yang dikategorikan 15- 34 tahun mencapai 62,3 persen, hal itu telah melebihi setengah dari persentase keseluruhan pengguna ganja di Uruguay. Keputusan / kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Uruguay dengan melegalkan ganja ini akan memiliki dampak implikasi yang besar terhadap masyarakat Uruguay, apabila kebijakan ini menuju kearah yang salah maka peningkatan jumlah penggunaan ganja dikalangan usia produktif ini akan terus semakin meningkat dan ini juga akan berimbas terhadap peredaran ganja yang akan semakin meningkat juga, namun, sebaliknya jika keputusan

4

<http://www.druglawreform.info/en/publications/systems-overload/item/874-drug-laws-and-prisons-in-uruguay> 14/ 04/ 2014 Pukul 17.03

dengan melegalkan ganja ini tepat, maka penggunaan ganja di usia produktif dapat di terus tekan angka penggunaannya dan tentunya peredaran ganja di Uruguay dapat dikurangi dan diawasi oleh Pemerintah Uruguay.

Pada pasal 2 Undang – undang yang baru saja dilegalisasikan ini, tertulis bahwa segala sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Keputusan Undang - Undang Nomor 14,294, tanggal 31 Oktober 1974, maka negara akan mengambil kendali dan regulasi dari kegiatan impor, ekspor, penanaman, tumbuh, panen, produksi, pengadaan dalam kapasitas, penyimpanan, pemasaran dan distribusi ganja dan turunannya, melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang telah diberikan mandat hukum didalam menangani setiap permasalahan yang berkaitan dengan ganja sesuai dengan hukum yang telah ditentukan.

Pada Pasal 3 undang – undang yang baru ini juga Pemerintah Uruguay membuat peraturan Penanaman, industrilisasi dan penjualan ganja psikoaktif untuk selain tujuan penelitian ilmiah dan penggunaan medis harus dibawah pengawasan IRCCA. Pemerintah Uruguay juga memastikan Psikoaktif merupakan tanaman ganja yang dimana biji dan daun dipisahkan batang termasuk minyak ekstraksinya, penggunaan potensi farmasi harus memiliki jumlah tetrahydrocannabinol ( THC ) alami , kurang dari 1 % ( satu persen ) dari volume keseluruhannya .<sup>5</sup>

<sup>5</sup> La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay ,en sesión de hoy ,ha sancionado el

## **Kebijakan Pemerintah Uruguay Melanggar Hasil Konvensi Tunggal 1961**

Pada pasal 2 dibagian 9 hasil konvensi tunggal 1961, menjelaskan bahwa : setiap anggota dengan hasil konvensi ini tidak diharuskan untuk menerapkan ketentuan Konvensi yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dalam industri selain untuk tujuan medis atau ilmiah, namun dengan ketentuan bahwa : Setiap negara – negara atau kelompok - kelompok harus memastikan metode dan cara yang tepat dalam proses denaturasi (pengubahan sifat atau unsur suatu benda ), dimana penggunaan narkotika itu tidak untuk disalahgunakan, karena dapat menimbulkan efek yang buruk ( pasal 3, ayat 3 )

Kebijakan Pemerintah Uruguay juga sangat bertentangan dengan kewajiban umum dari kesepakatan dari hasil konvensi tunggal 1961. Pada pasal 4 di dalam hasil konvensi 1961, dijelaskan tentang hal – hal yang berkaitan dengan kewajiban umum dari seluruh negara – negara yang telah menandatangani dan meratifikasi hasil konvensi ini tanpa terkecuali. Bagian ini juga menjelaskan bahwa setiap negara yang telah meratifikasi maka diwajibkan menyesuaikan undang – undang ataupun peraturan dalam negeri negara – negara tersebut dengan hasil konvensi tunggal 1961, sehingga setiap peraturan negara, harus disesuaikan dengan hasil konvensi tunggal 1961 sebelum melegalisasikan undang – undang

---

siguiente. Proyecto de Ley ( Undang undang yang baru dilegalisasikan)

tersebut. Pemerintah Uruguay telah melanggar ketentuan yang dijelaskan pada pasal 4 bagian 1 ini, karena Uruguay telah membuat suatu peraturan baru yang berisikan tentang legalisasi ganja di Uruguay. Uruguay merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi hasil konvensi tunggal 1961, namun telah melanggar pasal 4 bagian 1 ini yang merupakan kewajiban umum dari setiap negara yang telah meratifikasi hasil konvensi tunggal 1961 ini.

Pemerintah Uruguay juga membuat sebuah keputusan yang bertentangan dengan pasal 4 bagian 3 menjelaskan bahwa Pada pasal ini dijelaskan bahwa setiap negara yang telah meratifikasi hasil konvensi tunggal 1961 ini, harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Konvensi tunggal 1961. Pada bagian memfokuskan kepada negara – negara dapat membatasi penggunaan dan kepemilikan ganja secara eksklusif untuk tujuan medis dan ilmiah, selain itu bagian ini juga membuat larangan didalam proses produksi, manufaktur, ekspor, impor, distribusi, perdagangan, penggunaan dan kepemilikan narkotika dan psikotropika.

Sesuai dengan keputusan konstitusional dalam konvensi tunggal 1961, menjelaskan bahwa setiap pihak wajib mengambil tindakan-tindakan seperti memastikan proses budidaya, produksi, manufaktur, ekstraksi, kepemilikan, penawaran, menawarkan untuk dijual, pendistribusian, pembelian, penjualan, broker , pengiriman, pengiriman dalam bentuk transit, proses impor dan ekspor narkotika dan psikotropika berjalan sesuai dengan prosedur ketentuan hasil

konvensi tunggal 1961 ini, dan segala kegiatan bertentangan dengan ketentuan konvensi tunggal 1961 ini, jika dilakukan dengan sengaja akan menjadi pelanggaran hukum, dan apabila pelanggaran yang dilakukan dimasukkan kedalam kategori berat maka dapat dikenakan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran biasanya dalam bentuk pidana penjara atau hukuman lainnya.

Kebijakan ini juga mendapat kritikan dari Raymond Yans yang menjabat sebagai Presiden INCB ( *International Narcotics Control Board* ). Yans mengatakan bahwa " sangat terkejut " terhadap keputusan legislatif Uruguay ". Yans melihat bahwa ada kesengajaan dari Uruguay memutuskan untuk melanggar ketentuan hukum internasional yang disepakati dan disahkan didalam sebuah perjanjian internasional." Raymond Yans juga mengklaim untuk mencapai tujuan sebuah perjanjian internasional, membutuhkan ketaatan dari setiap negara untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan manusia . "<sup>6</sup>

Pernyataan yang diutarakan oleh Yans tidak dapat mengubah keputusan Uruguay. Presiden Uruguay, Jose Musica yakin untuk tetap melegalkan ganja di Uruguay. Jose Musica dengan lantang menyuarakan negara manapun yang tidak menyetujui keputusan pelegalan ganja tersebut bisa bertemu dan berbicara langsung kepadanya. Jose Musica melihat adanya perbedaan perlakuan

terhadap negara yang sedang berkembang dan negara maju pada pelegalan ganja, beberapa negara seperti Belanda dan negara bagian di Amerika juga telah melakukan pelegalan ganja. Berdasarkan pernyataan tersebut, presiden Uruguay, José Alberto Mujica Cordano, ingin menyuarakan pendapatnya tentang adanya diskriminasi yang dilakukan badan PBB didalam menanggulangi permasalahan ganja di dunia internasional. Menurut Presiden Jose Mujica sistem yang ditentukan oleh PBB hanya berlaku bagi negara – negara dunia ketiga atau negara berkembang saja, sedangkan untuk negara – negara maju hukum yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika yang tertulis dalam hasil konvensi tunggal 1961 tidak pernah ditegakkan. Menurut Presiden Jose Mujica, kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan melegalkan ganja di Colorado, pemerintah belanda dan kebijakan pemerintah -pemerintah negara yang maju lainnya juga melegalkan ganja seharusnya juga wajib untuk dikritisi dan bukan kebal terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan didalam konvensi tunggal 1961 yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika.

### **Kesimpulan**

Banyak negara – negara di dunia yang melakukan kebijakan – kebijakan untuk mencari solusi terbaik agar dapat mengurangi masalah – masalah sosial yang akan terjadi jika tetap membiarkan penggunaan dan peredaran ganja terus meningkat, bahkan terkadang kebijakan itu cenderung menjadi masalah baru bagi dunia

<sup>6</sup> <http://www.thenewamerican.com/world-news/south-america/item/17174-un-claims-uruguay-not-allowed-to-end-marijuana-prohibition> 18/04/2014 Pukul 23.00 WIB.

internasional, salah satu negara yang telah membuat kebijakan tersebut adalah Uruguay. Pemerintah Uruguay membuat kebijakan tersebut disebabkan karena adanya pandangan dari Pemerintah Uruguay bahwa apabila permasalahan meningkatnya penggunaan ganja di Uruguay tidak diselesaikan secepatnya maka permasalahan kompleks seperti banyaknya kasus pembunuhan, perampokan dan kasus kriminal lainnya akan semakin meningkat jumlahnya. Implikasi dari semakin meningkatnya tingkat kasus kriminal maka peningkatan jumlah narapidana dan semakin berkurang jumlah kuantitas penjara juga harus menjadi masalah yang harus dipikirkan penyelesaiannya oleh Pemerintah Uruguay.

Pemerintah Uruguay Membuat kebijakan melegalisasi ganja dengan harapan bahwa tindakan – tindakan kriminal di Uruguay yang selama ini grafiknya menaik dapat dikurangi, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi anggaran pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ganja, baik itu berkaitan dengan meningkatnya jumlah kuantitas penjara di Uruguay, maupun anggaran untuk keperluan merehabilitasi pengguna ganja di Uruguay. Kebijakan ini juga dilakukan untuk melawan para pedangar ganja ilegal yang masuk ke kawasan Uruguay.

### Daftar Pustaka

Jack C. Plano. Roy Olton. 1999  
“ *Kamus Hubungan Internasional* “  
Cetakan Kedua, Penerbit CV Putra  
A Bardin,

Atmasamita, Romli, 1997. “  
*Tindak Pidana Narkotika  
Transnasional dalam sistem hukum  
pidana Indonesia.*” Bandung : Citra  
Aditya Bakti.

La Cámara de  
Representantes de la República  
Oriental del Uruguay ,en sesión  
de hoy ,ha sancionado el  
siguiente. Proyecto de Ley (   
Undang undang yang baru  
dilegalisasikan)

<http://www.insightcrime.org/news-briefs/uruguay-marijuana-legalization-will-drive-paraguay-production-anti-drug-official>  
09/04/2014 Pukul 16.51 WIB.

<http://www.thenewamerican.com/world-news/south-america/item/17174-un-claims-uruguay-not-allowed-to-end-marijuana-prohibition>  
18/04/2014  
Pukul 23.00 WIB.

<http://www.druglawreform.info/en/publications/systems-overload/item/874-drug-laws-and-prisons-in-uruguay>  
14/ 04/ 2014  
Pukul 17.03